

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *E-Government*

2.1.1.1 Definisi *E-Government*

. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menyatakan bahwa *e-government* merupakan inisiatif untuk membangun penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, guna meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. *World Bank* (2017) menyatakan bahwa *e-government* merupakan transformasi pemerintahan melalui digitalisasi layanan dan sistem pemerintahan agar lebih efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan TIK untuk administrasi publik, layanan kepada masyarakat, dan manajemen keuangan publik

Mardiasmo (2019:38) menyatakan bahwa *E-Government* adalah usaha untuk meningkatkan prosedur dan proses administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet, sehingga pelayanan kepada para pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Purnomo & Handayani (2019) juga menyatakan bahwa *Electronic Government* atau *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses administrasi pemerintahan agar lebih efisien dan efektif, serta memberikan layanan publik yang transparan dan

berkualitas kepada masyarakat. Saat ini, berbagai sistem pemerintahan daerah telah mulai terhubung dan dikembangkan dalam bentuk teknologi yang dipantau serta dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, implementasi *e-government* juga telah mulai diimplementasikan di Indonesia.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat *E-Government*

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi adalah pengembangan *e-government* di setiap Kementerian atau Lembaga serta Pemerintah Daerah. *E-government* yang diorganisir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk:

1. Menyediakan panduan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah.
2. Mendorong peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang komprehensif, seimbang, dan objektif.
3. Memetakan kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah secara nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

pelayanan publik; (4) membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuan dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab; (5) menyediakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Khairudin *et al.*, (2021:32) menjelaskan bahwa manfaat penerapan *e-government* meliputi:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, di mana informasi dapat diakses 24 jam tanpa perlu menunggu kantor dibuka, dan dapat dicari dari kantor atau rumah tanpa harus datang secara fisik atau bertemu langsung.
2. Peningkatan interaksi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, sehingga menciptakan transparansi dan hubungan yang lebih harmonis antar pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi yang mudah, memungkinkan masyarakat belajar untuk mengakses dan menampilkan informasi secara daring.
4. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, seperti koordinasi melalui email atau *video conferencing*.

Negara yang telah mengimplementasikan *e-government* dalam tata pemerintahannya atau proses pelayanan masyarakat akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain:

1. Memperbaharui kualitas pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingannya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri), khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi di berbagai aspek kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penerapan konsep *Good Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Menciptakan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan lingkungan masyarakat yang mampu menjawab berbagai permasalahan secara tepat dan cepat, sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada.

2.1.1.3 Model *E-Government*

Penerapan *e-government* memiliki model-model strategis yang relevan dalam pelaksanaannya. Menurut Khairudin *et al.*, (2021:34), terdapat empat model relasi dalam penyampaian layanan *e-government* kepada publik, yaitu sebagai berikut:

1. *Government to Citizen (G2C)*

Model ini merujuk pada upaya pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi guna meningkatkan hubungan dengan masyarakat.

Dengan kata lain, G2C berfokus pada penyediaan layanan publik dan informasi secara searah dari pemerintah kepada warga masyarakat.

2. *Government to Business (G2B)*

Model G2B mencakup transaksi elektronik yang memungkinkan pemerintah menyediakan informasi yang diperlukan oleh pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah. Informasi tersebut dapat diakses melalui situs web resmi pemerintah yang dirancang untuk mendukung kebutuhan komunitas bisnis.

3. *Government to Government (G2G)*

Model ini memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara daring antarinstansi pemerintah melalui basis data terintegrasi. Contohnya adalah hubungan administratif antara kantor pemerintah daerah dengan kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk menyediakan data dan informasi akurat bagi warga negara asing yang berada di dalam negeri.

4. *Government to Employees (G2E)*

Model ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bertugas sebagai pelayan publik. Salah satu contohnya adalah sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, yang bertujuan tidak hanya untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk mendukung proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi pegawai pemerintah secara efektif.

2.1.1.4 Indikator Implementasi *E-Government*

Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pengembangan *e-government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Inpres ini menegaskan bahwa implementasi *e-government* dilakukan melalui beberapa tahapan/dimensi utama, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Persiapan (*Preparation*)

Tahap awal yang menekankan kesiapan organisasi dan infrastruktur sebelum *e-government* dijalankan secara penuh. Unsur-unsurnya meliputi kebijakan dan perencanaan *e-government*.

2. Dimensi Pematangan (*Maturation*)

Tahap pengembangan awal layanan elektronik yang mulai digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi pemerintahan. Unsur-unsurnya meliputi pengembangan aplikasi *e-government*, integrasi sistem antar perangkat daerah, dan standarisasi pengelolaan data dan informasi.

3. Dimensi Pemantapan (*Consolidation*)

Tahap integrasi sistem antarunit kerja untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelayanan. Unsur-unsurnya meliputi keberlanjutan layanan *e-government* serta pemeliharaan dan keamanan sistem.

4. Dimensi Pemanfaatan (*Utilization*)

Tahap optimalisasi pemanfaatan *e-government* untuk mendukung pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh. Unsur-unsurnya

pemanfaatan oleh aparaturn pemerintah, pemanfaatan oleh masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

2.1.2 *Good Governance*

2.1.2.1 Definisi *Good Governance*

Good governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) adalah suatu sistem dan proses pengelolaan organisasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan, guna meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi berkelanjutan.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang dilayaninya, *private sectors* (sektor swasta), dan *society* (masyarakat). Oleh karena itu, *good governance* di sektor publik didefinisikan sebagai proses tata kelola pemerintah yang efektif, yang melibatkan pemangku kepentingan dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial-politik, serta pemanfaatan sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan rakyat, dengan mengikuti prinsip keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Supriatna 2017:9).

Istilah *good governance* umumnya dipahami sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksana manajemen pembangunan yang kuat dan akuntabel, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi

dan mekanisme pasar yang efisien. Konsep ini mencakup upaya mencegah terjadinya salah alokasi sumber daya dan dana investasi, menekan korupsi baik dalam ranah politik maupun administratif, menerapkan disiplin anggaran, serat membangun kerangka hukum dan politik yang mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi dan usaha (Mardiasmo 2018:23).

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapatan dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus ditetapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.

2. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk dalam rangka penyusunan dan penggunaan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, sehingga setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab.

4. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kewajaran dan Kesenjangan

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab.

2.1.2.3 Pilar – pilar *Good Governance*

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 1997) yang dikutip oleh Khairudin *et al.*, (2021: 18-19) *Good Governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga pilar utama yaitu:

1. Negara atau tata pemerintahan (*state*);
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*);
3. Masyarakat (*society*).

Ketiga pilar dalam *Good Governance* memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pemerintah berfungsi terutama sebagai perumusan kebijakan, pengendali, serta pengawas jalannya pembangunan. Sektor swasta berperan sebagai penggerak utama

kegiatan ekonomi dan pembangunan melalui aktivitas usaha. Sementara itu, masyarakat menjadi pihak yang tidak hanya menerima dampak kebijakan, tetapi juga turut berperan sebagai pelaku dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga berinteraksi langsung dengan sektor pemerintah maupun sektor swasta.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010), dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan *Good Governance*, diperlukan tiga pilar, yaitu (1) negara, (2) dunia usaha, (3) masyarakat.

1. Negara berkewajiban merumuskan serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai landasan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Pemerintah juga harus menciptakan kondisi yang mendukung agar seluruh penyelenggara negara dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dunia usaha perlu menyusun dan mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dalam aktivitas bisnisnya guna meningkatkan produktivitas nasional. Selain itu, sektor usaha juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif dengan memberikan masukan dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan bidang usahanya.
3. Masyarakat memiliki peran untuk melakukan pengawasan sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan pemerintah. Masyarakat juga dituntut berpartisipasi dalam memberikan masukan

terhadap penyusunan dan pelaksanaan peraturan serta kebijakan publik.

Untuk menjalankan peran tersebut, masyarakat perlu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas agar mampu melakukan kontrol sosial secara bertanggung jawab.
- b. Memperkuat konsolidasi dan pemanfaatan sumber daya sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih optimal.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Bahri (2019:17) kualitas laporan keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan proses akuntansi dalam menyediakan informasi yang relevan serta berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, dengan tujuan agar informasi tersebut mampu mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Mahmudi (2016:13) kualitas laporan keuangan merupakan informasi yang membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi lebih tepat. Terdapat lima indikator yang menentukan kualitas informasi dalam laporan keuangan, yaitu relevansi, kejelasan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.3.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah

Jika laporan keuangan publikasian itu dieksplorasi dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan tingkat likuiditas, solvabilitasnya, *leverage*, surplus/defisit, dan kesinambungan fiskal;
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
3. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional;
 - a) Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
 - b) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan;
 - c) Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
 - d) Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Aspek-aspek relevansi mencakup:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian saat ini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat memberikan manfaat kepada pengguna untuk pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan tantangan yang ada. Informasi diberikan secara jelas agar tidak terdapat kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan terbebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan data secara faktual, serta dapat diverifikasi. Karakteristik keandalan mencakup:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar dan dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dapat diuji, dan apabila pengujian tersebut dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum dan bukan untuk kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.5 Unsur – unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berikut ini yang termasuk unsur-unsur dari laporan keuangan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ringkasan sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang secara langsung dicakup oleh pendapatan – LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsurnya adalah pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas terkait dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakupnya adalah penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.4 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang bersangkutan, antara lain:

1. Purnomo & Handayani (2019) dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia, *Good Governance*, dan *E-Government* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Pada Pemerintah Daerah di Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Good Governance* dan *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Maharani & Gamayuni (2025) dengan judul “Pengaruh *E-Government* dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik nilai *e-government* suatu pemerintah daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun.

3. Philadhelphia *et al.*, (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Pada OPD Kabupaten Klaten. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Tabupook & Wulandari (2024) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Pada BPKAD Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Utomo *et al.*, (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Studi pada BPKAD Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. *Good Governance* diperlukan untuk menghasilkan pelaporan berupa laporan keuangan

pemerintah daerah yang tepat dan akurat sehingga memperoleh kualitas laporan keuangan daerah yang baik.

6. Hosana *et al.*, (2022) dengan judul “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Pemoderasi” Studi Kasus Pada Aparatur OPD Kab. Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Agung & Mulyani (2020) dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
8. AgustiningTyas *et al.*, (2020) dengan judul Pengaruh *Good Governance*, sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9. Nirwana & Darmawaty (2023) dengan judul “The Effect of *Good Governance* on The Financial Statements Quality”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi peningkatan tata kelola yang baik, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

10. Pongsibidang & Nugroho (2023) dengan judul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.
11. Lestari (2025) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Prosedur Keuangan, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya penggunaan teknologi informasi mempermudah penyajian laporan yang tepat waktu dan relevan.
12. Aisyah & Sulistyowati (2025) dengan judul “Pengaruh *Good Governance*, Ukuran, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan responsibilitas, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

13. Laoli & Mukti (2022) dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Pengendalian Internal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa implementasi penggunaan terhadap pemanfaatan teknologi di BPKAD Kota Bekasi sudah berjalan memadai, sehingga hal ini dapat membantu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien.
14. Hanifah & Haryanto (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Studi Pada Seluruh SKPD Pengelola Keuangan Pemerintah Kab/Kota Se-Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan *Good Governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut membuktikan penerapan *Good Governance* kurang memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.
15. Herawati & Nopianti (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
16. Rachmawati & Anik (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good*

Governance, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Studi empiris pada OPD Kab. Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin buruk *Good Governance*, maka tidak mampu meningkatkan atau menurunkan kualitas laporan keuangan. Sementara, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

17. Zein *et al.*, (2024) dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kab. Mojokerto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh lingkungan politik yang tidak stabil dan terus berubah, sehingga implementasi prinsip *Good Governance* tidak dapat dilakukan secara konsisten.
18. Sari (2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance*, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” Studi Empiris pada Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

19. Utami & Berliani (2024) dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Pada BPKAD Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak mendapat pengaruh pada kualitas laporan keuangan, artinya *Good Governance* tidak memegang pengaruh secara parsial pada kualitas laporan keuangan di BPKAD Kota Bandung.
20. Yuniza *et al.*, (2024) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Maros”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun demikian, penerapan teknologi informasi masih memberikan pengaruh yang positif pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Maros.

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai persamaan dan perbedaannya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Purnomo & Handayani (2019)	- Variabel X <i>Good Governance</i>	- Variabel X Sumber Daya Manusia	Hasil penelitian menunjukkan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi:

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“Pengaruh Sumber Daya Manusia, <i>Good Governance</i> , dan <i>E-Government</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	dan <i>E-Government</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	bahwa <i>Good Governance</i> dan <i>E-Government</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	Volume 8, Nomor 12, Desember 2019 e-ISSN: 2460-0585
2.	Maharani & Gamayuni (2025) “Pengaruh <i>E-Government</i> dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”	- Variabel X <i>E-Government</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Transparansi - Sumber data Teknik pengumpulan data - Model penelitian - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>e-government</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak Volume 2, Nomor 3, Juli 2025 e-ISSN: 3046-8124 p-ISSN: 3046-8817 Hal 169-183
3.	Philadelphphia et al., (2020) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal - Objek Penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	<i>Journal of Islamic Accounting Research</i> Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2020 : 17-35 P-ISSN: 2721-5474
4.	Tabupook & Wulandari (2024) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Desa Pemerintah Daerah, <i>Good</i>	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Standar Akuntansi Pemerintah - Objek penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>good governance</i> memiliki dampak yang	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)b, Vol. 8 No. 3, 2024 P-ISSN: 2541-5255

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Governance</i> , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada Kabupaten Batang).		Analisis Regresi Linear Berganda	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	E-ISSN: 2621-5306 Page 2395
5.	Utomo <i>et al.</i> , (2021) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi pada BPKAD Kota Metro).	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia. - Objek penelitian - Analisis Persyaratan Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. <i>Good governance</i> diperlukan untuk menghasilkan pelaporan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat dan akurat sehingga memperoleh kualitas laporan keuangan daerah yang baik.	Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No.2, Oktober 2021 e-ISSN: 2722-0273 p-ISSN: 2722-0281
6.	Hosana <i>et al.</i> , (2020) ”Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel Moderasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal - Objek penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap kualitas	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi 16 (4) DOI: 10.33.061/jasti. V16i4.6233 License CC BY-NC 4.0

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemoderasi”		- Analisis regresi linear berganda - Analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak	laporan keuangan.	
7.	Agung Mulyani (2020) “Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah”	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Latar Belakang Profesi Kepala Daerah - Variabel Y Kinerja Pemerintah Daerah - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.	Jurnal SIKAP, Vol 4 (No.2), 2020, Hal 142-159 p-ISSN: 2541-1692 e-ISSN: 2599-1876
8.	AgustiningTyas <i>et al.</i> , (2020) “Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Malang”.	-Variabel X <i>Good Governance</i> -Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -Metode Kuantitatif	- Variabel X Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia. - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Hasil penelitian ini menunjukan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Volume 8, No. 1, Tahun 2020 e-ISSN: 2715-7016
9.	Nirwana & Darmawaty (2023)	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y	- Analisis Regresi Linear Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good</i>	ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 6, Issue 1,

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>“The Effect of Good Governance on The Financial Statements Quality”</i>	Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Objek penelitian - Subjek penelitian	<i>governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi peningkatan tata kelola yang baik, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan..	(2023), 1 – 12 p-ISSN: 2621-1963 e-ISSN: 2621-1505
10	Pongsibidang & Nugroho (2023) “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	- Variabel X Pemanfaatan Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.	Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat Volume 2 Nomor 1, Mei 2023, Halaman 48 – 65 e-ISSN: 2829-3177
11	Lestari (2025) “Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Prosedur Keuangan, Kompetensi SDM,	- Variabel X Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) - Variabel Y Kualitas	- Variabel X Pengawasan Internal, Sistem Prosedur Keuangan, Kompetensi SDM,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan	JAFM: Journal of Accounting and Finance Management Vol. 5, No. 6, January – February 2025

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang”.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. - Metode Kuantitatif	Komitmen Organisasi. - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda -	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya penggunaan teknologi informasi mempermudah penyajian laporan yang tepat waktu dan relevan.	E-ISSN: 2721-3013 P-ISSN: 2721-3005
12.	Aisyah & Sulistyowati (2025) “Pengaruh <i>Good Governance</i> , Ukuran, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	- Variabel X Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. - Metode Kuantitatif	- Variabel X Ukuran, Sistem Pengendalian Internal - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>good governance</i> , seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 14, Nomor 5. Mei 2025 e-ISSN: 2461-0585
13.	Laoli & Mukti (2024) “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan	- Variabel X Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>)	- Variabel X Standar Akuntansi Pemerintah - Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi	Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.4, No.1 Juni 2019, 171-185

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemoderasi Pengendalian Internal”	- Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Pengendalian Internal Analisis data menggunakan <i>Partial Least Square-Structural Equation Modeling</i> (PLS-SEM) - Objek penelitian - Subjek penelitian	informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, dimungkinkannya bahwa implementasi penggunaan teknologi di BPKAD Kota Bekasi sudah berjalan memadai, sehingga hal ini dapat membantu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien.	E-ISSN: 2528-0163
14.	Hanifah & Haryanto (2021) “Analisis Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi pada Seluruh SKPD Pengelola Keuangan Pemerintah Kab/Kota Se-Jawa Tengah)	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan	- Variabel X Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern. - Objek penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut membuktikan <i>good governance</i> kurang memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.	Diponegoro Journal of Accounting Volume 10, Nomor 4, tahun 2021, Hal 1-7 ISSN (Online); 2337-3806

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Herawati & Nopianti (2017) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”	-Variabel X <i>Good Governance</i> , Pemanfaatan Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) -Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan -Metode Kuantitatif	- Variabel X Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	STAR – Study Accounting Research Vol XIV, No 2 – 2017 ISSN: 1693-4482
16.	Rachmawati & Anik (2020) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah, <i>Good Governance</i> , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Empiris pada OPD Kab. Semarang).	-Variabel X <i>Good Governance</i> , Pemanfaatan Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) -Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan -Metode Kuantitatif	- Variabel X Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas aparatur Pemerintah Daerah. - Objek penelitian - Subjek penelitian Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin buruk <i>good governance</i> , maka tidak mampu meningkatkan atau menurunkan kualitas laporan keuangan. Sementara, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya	Prosiding KONGRES I ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020 ISSN: 2720-9687

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.	
17.	Zein <i>et al.</i> , (2024) “Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kab. Mojokerto”	- Variabel X <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Standar Akuntansi Pemerintah - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>good governance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemungkinan disebabkan oleh lingkungan politik yang tidak stabil dan terus berubah.	<i>Business, and Accounting</i> Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN: 2597-5234
18.	Sari, F. M., (2022) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Desa Pemerintah Daerah, <i>Good Governance</i> , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada	- Variabel X <i>Good Governance</i> , Pemanfaatan Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) - Variabel Y - Metode Kuantitatif	- Variabel X Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Desa Pemerintah. - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh	Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan auditing Vol. 3 (No. 1), 2022, Hal: 27 – 42 ISSN 2723-2522 (Online)

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Batang).			signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	
19.	Utami Berliani (2024) “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> , dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.	- Variabel X - <i>Good Governance</i> - Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda -	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good governance</i> tidak memegang pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kota Bandung.	Jurnal Maneksi Vol 13, No. 2, Juni 2024 p-ISSN: 2302-9560 / e-ISS: 2597-4599
20.	Yuniza <i>et al.</i> , (2024) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Maros”.	- Variabel X - Penerapan Teknologi Informasi (sejalan dengan <i>e-government</i>) - Variabel Y - Kualitas Laporan Keuangan - Metode Kuantitatif	- Variabel X Kompetensi Sumber Daya Manusia - Objek penelitian - Subjek penelitian - Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun demikian, penerapan teknologi informasi masih memberikan pengaruh yang positif terhadap kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Maros.	Al-Buhuts e-Journal Volume 20 Nomor 2, Desember 2024 On Line ISSN: 2442-823x Print ISSN: 1907-0977

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Naila Larisa (2025) Pengaruh Implementasi <i>E-Government</i> dan Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025)				

2.1 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan yang berkualitas memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah karena menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Laporan keuangan yang andal membantu pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, serta evaluasi kinerja keuangan (Mahmudi, 2016). Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat mencegah penyimpangan, kesalahan pencatatan serta potensi praktik korupsi (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya implementasi *e-government* dan prinsip *Good Governance*. Implementasi *e-government* dan prinsip *Good Governance* memiliki hubungan yang erat dan saling berhubungan dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *E-government* berperan sebagai sarana pemanfaatan teknologi informasi yang mendorong terwujudnya prinsip *Good Governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan

daerah. Melalui sistem *e-government*, proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah diawasi, sehingga memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, penerapan prinsip *Good Governance* menciptakan lingkungan dengan kebijakan dan kelembagaan yang mendukung keberhasilan implementasi *e-government*, seperti adanya komitmen pimpinan, kejelasan regulasi, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* sangat bergantung pada penerapan *Good Governance*, dan sebaliknya *e-government* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik yang bermuara pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterkaitan tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Purnomo dan Handayani (2019) menemukan bahwa implementasi *e-government* dan *Good Governance* saling berhubungan dan secara bersama-sama berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Pranesti (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan *e-government* mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari prinsip *Good Governance*, yang berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa hubungan yang saling menguatkan antara *e-government* dan *Good Governance* merupakan faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori agensi. Teori Agensi (*Agency Theory*) yang diperkenalkan oleh Jensen Meckling pada tahun 1976 menjelaskan hubungan antara rakyat dan pemerintah sebagai hubungan keagenan. Dalam konteks ini, rakyat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya bagi kepentingan publik. Sebagai pihak yang memberi kepercayaan, rakyat mengharapkan pemerintah dapat mengelola sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi cerminan kemampuan pemerintah dalam memenuhi tuntutan akuntabilitasnya. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan sesuai standar akuntansi menunjukkan adanya transparansi serta tanggung jawab, sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara *agent* dan *principal* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala (Yuliani, 2017).

Implementasi *e-government* merupakan bentuk usaha pemerintah dalam meningkatkan proses serta prosedur administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet, sehingga layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan menjadi lebih cepat dan mudah (Mardiasmo, 2018:38). Implementasi *e-government* berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui perbaikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi memungkinkan proses perencanaan hingga pelaporan keuangan dilakukan

secara otomatis dan tertib, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan keandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan (Wulandari & Agustin, 2019). Hal tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi implementasi *e-government* yang diterapkan, maka laporan keuangan akan semakin berkualitas.

E-Government kaitannya dengan *agency theory* adalah *e-government* berperan sebagai mekanisme yang memperkuat hubungan agen dan prinsipal. *E-Government* memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan transparansi dan keterbukaan yang ditingkatkan oleh *e-government*, masyarakat dapat lebih efektif memantau kinerja pemerintah, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laoli dan Mukti (2024), yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi atau penerapan *e-government* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2025) juga menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya penggunaan teknologi informasi mempermudah penyajian laporan yang tepat waktu dan relevan.

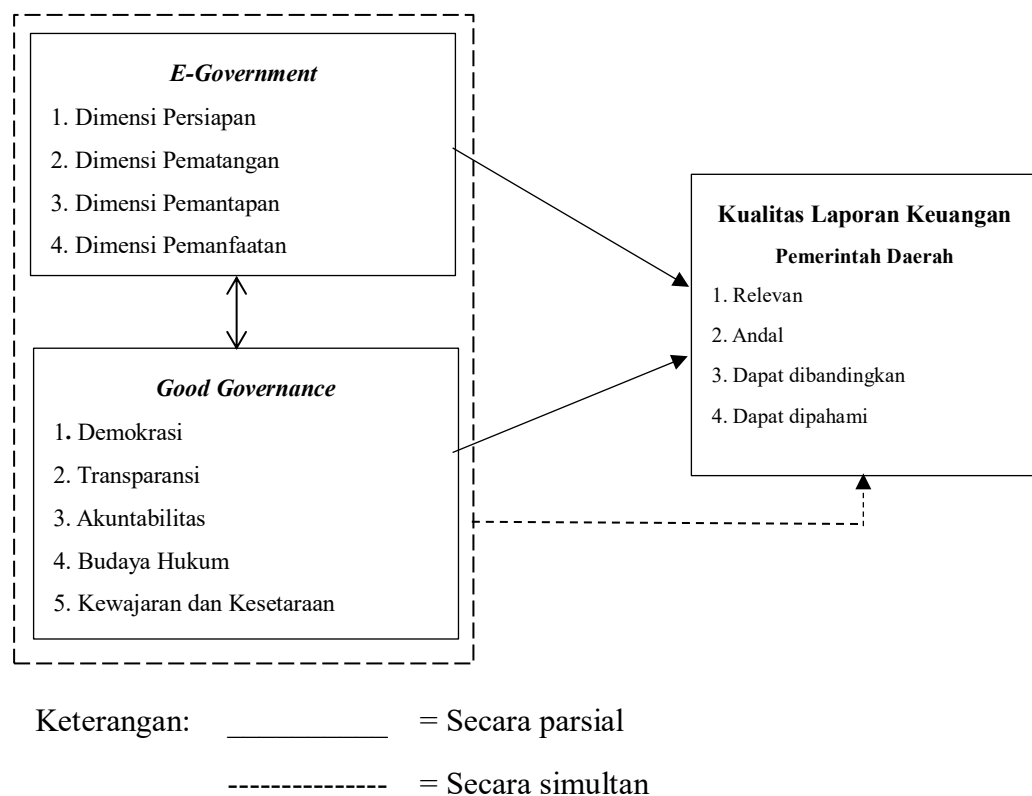
Good Governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta berfokus pada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2018:22). Hubungan antara *Good Governance* dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tercermin dari penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Penerapan tata kelola yang baik mendorong keterbukaan informasi, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan pengawasan, sehingga laporan keuangan disusun secara lebih akurat, sesuai standar, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sari & Kurniawan, 2018). Dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan tertib, laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih andal, relvan, dan tepat waktu. Oleh karena itu, semakin baik implementasi *Good Governance*, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Good Governance berkaitan dengan *Agency Theory* melalui perannya sebagai sistem yang memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan masyarakat serta mengelola sumber daya publik secara efisien. Hal ini mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*), serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hosana *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Darmawaty (2023) menyatakan bahwa *Good*

Governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya semakin tinggi peningkatan tata kelola yang baik, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil kerangka dan didasari oleh penelitian terdahulu, maka digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, diperlukan pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya antara variabel independen dan variabel dependen untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi *E-Government* dan Prinsip *Good Governance* secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
2. Implementasi *E-Government* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Prinsip *Good Governance* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Tasikmalaya.